

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang hukum pidana secara tradisional dibagi atas hukum pidana material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material sering disebut hukum pidana dan hukum pidana formal disebut hukum acara pidana. Dari namanya itu sendiri maka secara mudah dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana itu merupakan peraturan tentang bagaimana hukum pidana (material) itu ditegakkan atau diacarakan.¹

Hukum Acara Pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran material. Kebenaran material merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat pada tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan di pengadilan guna menemukan apakah terbukti telah melakukan suatu tindak pidana dan apakah orang tersebut (Terdakwa) dapat dipersalahkan.²

Untuk mencari kebenaran material maka dilakukan proses pembuktian pada persidangan di pengadilan. Proses pembuktian perkara pidana ini adalah untuk mencari tahu benar tidaknya telah terjadi perbuatan pidana serta mencari tahu apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Proses pembuktian didalam

¹ A. Hamzah, dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta. Bina Aksara. Hal 1.

² *Ibid*. Hal 7.

persidangan harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHAP seperti :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Didalam hukum acara pidana yang dianut Indonesia terdapat beberapa asas-asas yang menjadi prinsip dasar dari pada hukum acara pidana itu sendiri seperti: Azas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, azas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), azas accusatoir, azas sidang terbuka untuk umum, dan lain-lain. Azas adalah prinsip dasar yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.³

Azas Accusatoir merupakan salah satu asas yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Azas Accusatoir menunjukkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa pada tingkat penyidikan ataupun pada tingkat persidangan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan melainkan sebagai subjek.⁴ Subyek hukum itu sendiri memiliki arti segala sesuatu yang memiliki (mendukung) hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang.

³ Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 37.

⁴ Damang. 2011. *Asas-asas Umum KUHAP*. <https://damang.web.id>. Diakses tanggal 6 September 2017.

Dengan adanya azas *accusatoir* sebagaimana diatur didalam pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “ *Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*”. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 ayat (2) KUHAP menjelaskan “*penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”.

Pada proses penyidikan, penyidik memiliki beberapa tugas dan wewenang salah satunya untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peran seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disebut (BAP).⁵

Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi

⁵ Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Bandung. Widya Pdajaran. Hal 283.

ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.⁶

Hasil dari proses pemanggilan orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi adalah berupa BAP yang akan menjadi dasar penuntut umum dalam membuat surat dakwaan kepada tersangka pada saat persidangan.

Sudah menjadi penilaian umum bahwa pelayanan kepolisian pada masyarakat begitu rendah, profesionalisme kalangan aparat kepolisian tidak menunjukkan bukti yang jelas. Penyidik sering kali menganggap bahwa penyiksaan adalah jalan terbaik dan termudah untuk bisa mengorek keterangan dari seorang tersangka. Hal ini terlihat dengan banyaknya pemberitaan di media massa tentang tersangka yang mengalami penyiksaan saat di tahanan. Seperti halnya dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri terhadap tersangka di dalam pemeriksaan untuk mendapatkan suatu pengakuan atas kejahatan tertentu, tak jarang kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan menyebabkan luka hingga kematian. Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih yang dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang penyidik. Selain itu, juga bertentangan dengan HAM.⁷

Sangatlah disayangkan, dikarenakan penyidik merupakan salah satu penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

⁶ *Ibid.* Hal 81.

⁷ *Ibid.* Hal 284.

Tentang Polisi Republik Indonesia yang seharusnya mengerti hak-hak seorang tersangka yang dilindungi oleh undang-undang serta penyidik harus memahami bahwa hasil dari proses pemeriksaan tersangka akan menghasilkan BAP yang menjadi dasar penuntut umum membuat surat dakwaan. Didalam proses persidangan penuntut umum akan membacakan surat dakwaan, serta menghadirkan BAP hasil pemeriksaan tersangka untuk memperkuat dakwaan penuntut umum. Dari proses pengambilan BAP tersangka yang diperoleh menggunakan tekanan oleh penyidik, akan sangat mempengaruhi kebenaran material sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana, sehingga akan berdampak kepada surat dakwaan penuntut umum terkait isi dari dakwaan penuntut umum kepada terdakwa di persidangan.

Perlakuan penyidik seperti ini, dapat dijumpai pada kasus perkosaan yang terjadi di Kota Malang. Tersangka merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi terpendang di Kota Malang yang berinisial GM (24). Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan kekerasan fisik terhadap tersangka ketika diperiksa dan didengar keterangannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bekas luka lebam yang terdapat pada bagian tubuh tersangka.

Berdasarkan keterangan tersangka, penyidik melakukan tekanan kepada tersangka untuk mendapatkan keterangan dari tersangka. Tekanan yang dilakukan penyidik kepada tersangka membuat tersangka tidak dapat memberikan keterangan secara bebas.

Perbuatan penyidik ini sangat bertentangan dengan prinsip azas accusatoir pada pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), melanggar Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi, dan melanggar Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan.

Didalam proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Malang, GM (Terdakwa) melalui Penasehat Hukumnya sempat mengutarakan tentang tekanan yang dilakukan penyidik untuk memperoleh keterangannya didalam BAP Terdakwa, hal ini dianggap mencederai kebenaran material dari BAP tersebut yang menjadi dasar surat dakwaan penuntut umum, tetapi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya tidak memasukkan hal tersebut didalam pertimbangan putusan Nomor : 648/Pid.B/2015/PN. Mlg, dan hal ini membuat penulis ingin mengetahui pendapat hukum Majelis Hakim yang memeriksa terkait BAP Terdakwa, sehingga mendorong penulis untuk mengadakan penelitian hukum yang berjudul : “ **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 648/Pid.B/2015/PN.Mlg TENTANG ADANYA DUGAAN PELANGGARAN ASAS ACCUISATOIR PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana status keterangan terdakwa dan penasehat hukumnya tentang adanya dugaan pelanggaran asas accusatoir dalam proses penyidikan yang disampaikan dalam persidangan?
2. Apa akibat putusan jika terbukti adanya dugaan pelanggaran asas accusatoir?

C. Tujuan Penelitian

Keberadaan tujuan penelitian sangatlah penting dalam menentukan awal penelitian yang ingin dicapai dari pemasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui status keterangan terdakwa dan penasehat hukumnya tentang adanya dugaan pelanggaran asas accusatoir dalam proses penyidikan yang disampaikan dalam persidangan.
2. Untuk mengetahui akibat putusan jika terbukti adanya pelanggaran asas accusatoir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama

untuk menguji teori terhadap kasus adanya dugaan pelanggaran asas accusatoir oleh penyidik.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literature bagi masyarakat Indonesia didalam mempelajari ilmu hukum tentang adanya dugaan pelanggaran asas accusatoir serta selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk bahan penelitian lanjutan bagi yang membutuhkan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir dan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana masyarakat untuk memperoleh pandangan dan pengetahuan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran asas accusatoir pada tingkat penyidikan sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam mensosialisasikannya.

3. Bagi Kalangan Praktisi Hukum

Sarana ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wacana bagi kalangan praktisi hukum berkaitan dengan pelanggaran asas accusatoir pada tingkat penyidikan.

4. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan maupun referensi untuk penelitian lebih lanjut berkaitan dengan analisis putusan pengadilan nomor 468/Pid.B/2015/PN.Mlg tentang adanya dugaan pelanggaran asas *accusatoir* pada tingkat penyidikan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam masyarakat.⁸

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah jenis data primer yang langsung dari sumber utama tanpa adanya perantara, yang didapat melalui proses interview/wawancara dan studi dokumentasi melalui dokumen atau arsip-arsip dari pihak GM (Terpidana), Penasehat Hukum terpidana, serta Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan cara mencatat atau meringkas dokumen-dokumen pada tempat/instansi yang diteliti.

⁸ Fakultas Hukum. 2016. *Pedoman Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal 17.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui bahan-bahan literature yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan, serta penelusuran situs-situs internet yang berhubungan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier berupa jenis data mengenai pengertian baku, istilah baku yang diperoleh dari ensiklopedia, kamus, glossary, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog/diskusi dengan pihak GM (Terpidana), Penasehat Hukum terpidana, serta majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dianggap mengetahui banyak mengenai permasalahan dalam penelitian yakni mengenai analisis yuridis terkait putusan pengadilan Nomor: 648/Pid.B/2015/PN.Mlg tentang adanya dugaan pelanggaran asas *accusatoir* pada tingkat penyidikan.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak GM (Terpidana), Penasehat Hukum terpidana, serta majelis hakim yang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta ditambah dengan penelusuran perundang-undangan dalam hal ini berkenaan dengan proses penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian hukum.

G. Sistem Penelitian

Sistem penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini diperoleh dari studi kepustakaan dan digunakan sebagai kerangka untuk memudahkan penulisan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan pembahasan permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan Analisis Putusan

Pengadilan Nomor: 648/Pid.B/2015/PN.Mlg Tentang Adanya Dugaan Pelanggaran Asas Accuisatoir Pada Tingkat Penyidikan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup ini berisi kesimpulan dan pembahasan mengenai hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

